

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan-kebijakan yang baru dan strategis sering disebut dengan terobosan baru. Terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah tidak selalu berhasil atau tidak sesuai dengan rencana dan target. Namun, beberapa Kepala Daerah sukses melaksanakan kebijakan-kebijakan baru sebagai bentuk terobosan yang positif. Salah satu kebijakan yang merupakan terobosan positif adalah *Program One Village One Product (OVOP)* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi OVOP

No	Kecamatan	OVOP	SKPD Pengampu	2013	2014	2015
1.	Sanden	Budidaya Ketela	Dipertahut		√	
2.	Pleret	Produksi Tahu dan Tempe	Disperindagkop		√	
3.	Pandak	Budidaya perikanan darat	DKP		√	
4.	Imogiri	Kampung Sirup	Disperindagkop/PU	√	√	
		Pasar Burung Puncung	PU			√
5.	Sewon	Rumah Produksi	Disperindagkop/PU		√	

		Sol Sepatu				
6.	Bantul	Toga	BKP3		√	
7.	Piyungan	Budidaya Jagung	Disperindagkop		√	
8.	Kasih	Kerajinan Kipas Kajigelem	Disperindagkop		√	
9.	Jetis	Budidaya Ikan Tawar	DKP		√	
10.	Dlingo	Rumah Produksi Camilan	Disperindagkop/PU/Disnakertrans			
		Kolam Ikan	Disnakertrans			√
11.	Sedayu	Produksi Sangkar Burung	Disperindagkop/PU		√	
12.	Kretek	Produk Makanan dan Souvenir	Disperindagkop/PU		√	
		Show Room Depok	PU			√
13.	Pajangan	Pengolahan Emping Garut	Dipertahut/BP3			
14.	Pundong	Penataan Gua Jepang	Disbudpar/PU	√	√	
		Rumah produksi Mie Edes	PU			√
15.	Bambanglipuro	Budidaya Pisang	Dispertahut/BP3		√	
		Show Room Sidomulyo	PU			√
16.	Banguntapan	Desa Wisata Organik	Dispertahut/PU/B LH		√	
17.	Srandakan	Penataan Wisata Pantai	PU/Disbudpar/D KP	√	√	

(Sumber: Materi pelatihan OVOP Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

Ditemukan pada: <http://jrd.bantulkab.go.id> 18 September 2015)

Tabel diatas menunjukkan tentang realisasi program OVOP. Program OVOP adalah salah satu terobosan yang diimplementasikan oleh Kabupaten Bantul.

Program *One Village One Product* atau yang lebih dikenal dengan sebutan OVOP, adalah suatu program berbasis *Community Development*, dengan pendekatan pembangunan ekonomi berdasarkan pasar yang diinisiasi Dr.Morihiko Hiramatsu, Gubernur dari Oita *Prefecture* di Jepang pada tahun 1979. Inisiatif OVOP dimaksudkan untuk membantu pengembangan kemampuan masyarakat desa pada produk tertentu dan meningkatkan ekonomi pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat pada level *grassroot*.¹

Morihiko Hikamatsu adalah mantan pejabat MITI (*Ministrial Internasional of Trade and Industrial*) yang terpilih menjadi Gubernur Prefektur Oita Jepang, yang mengimplementasikan OVOP pertama kali di Prefektur Oita pada tahun 1980. OVOP memang berhasil diterapkan di Jepang dan kemudian program ini diikuti oleh negara-negara lain seperti Thailand, China, Malaysia, Filipina, Mongolia, Malawi, Taiwan, dan negara lainnya termasuk Indonesia. Setelah gerakan OVOP masuk ke Indonesia, kemudian beberapa daerah di Indonesia mulai menjadikan OVOP sebagai program di daerahnya.²

Gerakan *One Village One Product* di Indonesia telah menjadi prioritas pembangunan Nasional. Hal ini didukung dengan adanya landasan hukum yang

¹ Paparan Deputi Bidang Pengkajian dan Sumberdaya UKMK dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dengan Pendekatan *One Village One Product* Melalui Koperasi, Jakarta 10 Desember 2013, hlm.2, ditemukan pada: <http://www.stekpi.ac.id>. diakses 6 November 2015 11.00 WIB

² *One Village One Product Movement*. 2015, ditemukan pada: https://en.wikipedia.org/wiki/One_Village_One_Product_Movement diakses pada 23 April 2015 20.00 WIB

sah untuk pelaksanaan OVOP di Indonesia. Landasan-landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui Pendekatan *One Village One Product* (OVOP)).³

Program OVOP dapat dijadikan sarana untuk mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang ada di setiap daerah. Karena, program OVOP mendorong daerah-daerah untuk dapat memunculkan produk-produk andalannya. Potensi lokal yang ada di daerah tentu berbeda-beda. Potensi lokal tumbuh sesuai kearifan lokal yang ada serta kekhasan daerah masing-masing. Maka, program OVOP sarat akan dorongan untuk memunculkan dan mengembangkan inovasi daerah sesuai dengan potensi-potensi lokal yang telah teridentifikasi dan diakomodir oleh program OVOP.

Terkait implementasi OVOP, sampai saat ini sudah ada 73 lokasi yang mengembangkan OVOP di seluruh Indonesia. Pembinaan dan pengembangan terus dilaksanakan pada 27 koperasi di 13 provinsi yang mengelola produknya melalui konsep OVOP. Beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi besar untuk pengembangan OVOP antara lain sentra kerajinan kulit di Sukaregang

³ Rudi Suharta. April 2014. *Pengembangan Produk Andalan Dengan Pendekatan One Village One Product(Ovop) Di Kecamatan Imogiri*. Jurnal Riset Daerah. Volume 13, No.1: Page 3-4. Ditemukan pada <http://jrd.bantulkab.go.id> diakses 18 September 2015 22.15 WIB

(Garut), sentra kerajinan anyaman Rajapolah (Tasikmalaya), sentra kerajinan gerabah di Plered (Purwakarta), Sentra kerajinan bambu Desa Panglipuran, Bangli (Bali), sentra pengolahan keripik pisang, singkong Desa Tanjung Karang Barat (Bandar Lampung), dan lain-lain.⁴

Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan OVOP adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul menerapkan program OVOP sebagai bagian dari Program Pengentasan Kemiskinan (PRONANGKIS).

Total jumlah Keluarga Miskin (GAKIN) di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 tercatat mencapai 39.424 KK dengan persentase 14,2 persen. Sedangkan untuk total jumlah jiwa miskin mencapai 122.021 jiwa dengan presentase 13,5 persen. Hal ini menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Bantul mengingat hasil dari analisa BAPPENAS bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan Kabupaten Bantul berada di bawah rata-rata provinsi.⁵

Sebagaimana *branding* baru Kabupaten Bantul yaitu *The Harmony Of Nature and Culture*, maka program OVOP dianggap selaras dengan *branding* tersebut. Program OVOP juga sesuai dengan visi Kabupaten Bantul yakni menuju Kabupaten Bantul yang produktif dan sejahtera.

Selain itu, OVOP juga selaras dengan dengan misi Kabupaten Bantul yakni “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

⁴ Pernyataan Martono Djohari (Asisten Deputi Urusan Penelitian Sumberdaya UKM) ditemukan pada portal berita www.investor.co.id edisi Kamis 15 Agustus 2013. Diakses pada 6 November 2015 12.00 WIB

⁵ Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Materi pelatihan: OVOP. Ditemukan pada: <http://jrd.bantulkab.go.id> 18 September 2015 22.10 WIB

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender”. Kabupaten Bantul mengadopsi program OVOP mulai tahun 2013, dimana masing-masing kecamatan diminta menggali Potensi Andalan Setempat (PAS) yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Program OVOP ini merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Seperti yang diketahui bahwa sasaran dari program OVOP ini adalah KK miskin yang ada di Kabupaten Bantul.

Salah satu hal yang penting di dalam implementasi program OVOP adalah pada saat pemilihan potensi ekonomi. Proses ini diserahkan sepenuhnya pada masyarakat. Karena masyarakat yang lebih merasakan potensi ekonomi mana yang mungkin bisa dikembangkan dan bisa mendapatkan nilai tambah. Setelah mendapatkan potensi yang diharapkan maka kemudian diwujudkan dalam kelompok-kelompok UKM di kecamatan-kecamatan yang ada di Bantul. Setelah itu SKPD akan turun langsung dan memberikan bimbingan kepada kelompok-kelompok tersebut.

Masing-masing kecamatan ditargetkan mampu menghasilkan 10 produk unggulan yang khas, berkualitas, dan berdaya jual tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan dana sebesar lima miliar rupiah untuk menyukseskan program ini. Program OVOP sangat strategis mengingat adanya *Asian Economic Community* (AEC) yang akan dimulai pada akhir tahun 2015, dan OVOP dapat dijadikan basis penguat ekonomi lokal pada saat AEC dimulai nantinya. Program OVOP diharapkan bisa terus berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja.

Saat ini tenaga kerja yang terserap di sektor IKM ini mencapai sembilan puluh sembilan ribu orang dan bahkan sekitar delapan belas persen masyarakat Bantul menggantungkan hidupnya dari sektor IK ini.⁶

Sesuai dengan semangat Inpres No 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil, maka pengembangan OVOP melibatkan seluruh komponen pemerintahan baik yang di Pusat maupun Daerah. Berhasil atau tidaknya program OVOP ditentukan oleh bagaimana keterlibatan dan partisipasi seluruh lintas pelaku terutama pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat yang menekuni produk masing-masing.⁷

Program OVOP yang diadopsi dari Jepang ini menarik untuk diteliti. Selain karena merupakan program yang berbasis *pro-poor*, program ini juga mendorong besarnya intensitas keterlibatan masyarakat untuk turut memajukan perekonomian keluarga maupun daerahnya. Masyarakat diposisikan sebagai aktor dan SKPD serta pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa suatu kebijakan publik lahir dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor pendorong munculnya sebuah kebijakan publik adalah adanya permasalahan yang terjadi di publik. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat berasal dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, dengan masalah yang bervariasi pada setiap bidang.

⁶ Pernyataan Bupati Bantul. *Pemkab Bantul Siap Hadapi AEC 2015*. Ditemukan pada : <http://krjogja.com/read/212384/pemkab-bantul-siap-hadapi-aec-2015.kr>. Diakses pada 23 April 2015 18.30 WIB

⁷ Djohari, Op.cit hlm.11

Pembuatan kebijakan publik ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik ini memiliki sebuah skema yang dikenal dengan *Policy Cycle*. Proses lain dari *Policy Cycle* yaitu berupa *Agenda Setting*, *Policy Formulation*, *Decision Making*, *Policy Implementation*, dan *Policy Evaluation*. Skema tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan juga tidak hanya dilakukan pemerintah (secara legal formal), tetapi juga aktor-aktor lain yang berada di luar pemerintah (masyarakat, LSM, dan lain-lain). Tahapan yang paling strategis dari keseluruhan tahapan *policy making* adalah *Agenda Setting* atau tahapan penyusunan agenda.

Sehingga penelitian terkait dengan program OVOP ini lebih difokuskan kepada proses perumusan kebijakannya, tepatnya pada tahap *Agenda Setting*. Program OVOP yang sangat pro rakyat ini perlu diketahui lebih jauh mengenai isu-isu yang diperhitungkan yang kemudian menghasilkan kebijakan publik berupa program OVOP yang strategik tersebut.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bantul terkait dengan program OVOP ini dikarenakan Kabupaten Bantul mengimplementasikan Program OVOP ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan potensi ekonomi lokal semata. Hal lain yang membuat Kabupaten Bantul cukup berbeda dengan daerah lain dalam menerapkan OVOP yaitu kesesuaian Program OVOP dengan branding yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul yaitu *The Harmony Of Nature and Culture* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Harmoni Alam dan Budaya”, dimana Program OVOP sendiri mendorong sasaran program yaitu masyarakat

miskin di desa-desa di Kabupaten Bantul untuk membuat produk andalan dari dengan muatan kearifan lokal dan budaya serta menggunakan bahan baku dari daerah Bantul.

Kelompok OVOP Gerabah Kasongan yang didorong untuk memproduksi gerabah yang sesuai dengan kearifan dan budaya lokal. Kelompok OVOP Mie Edes, Kelompok OVOP Pundong, dan kelompok-kelompok produksi makanan dan kerajinan lainnya didorong untuk menggunakan bahan baku dari hasil alam Kabupaten Bantul sendiri bukan dari daerah lain.⁸

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses *Agenda Setting* program *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui proses *Agenda Setting* program *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

1.1 Pengembangan atau pengaplikasian teori kebijakan publik

1.2 Pengembangan atau pengaplikasian teori *Agenda Setting*

⁸ Wawancara dengan Muji Rahayu, SH.M.Hum (Kepala Subbag Program) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Bantul pada 12 November 2015 10.52 WIB di Kantor DISPERINDAGKOP Bantul.

1.3 Pengembangan program OVOP

2. Secara praktis

2.1 Sebagai salah satu upaya mengetahui tingkat ketepatan dan keakuratan proses *Agenda Setting* yang sudah dilaksanakan Kabupaten Bantul

2.2 Meningkatkan kualitas *output* maupun *outcome* program OVOP untuk kesejahteraan masyarakat

2.3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program OVOP

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Kebijakan Publik (*Public Policy Theory*)

1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Wilson, kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan berada dalam lingkup politik dan membutuhkan proses politik di dalamnya.⁹

Sedangkan Hecllo memberikan pendapat dari sudut pandang tingkat analisis, dimana kebijakan adalah sebuah konsep yang kurang lebih berada di tengah-tengah, yakni dianggap berlaku untuk sesuatu yang “lebih besar” daripada keputusan tertentu, tetapi “lebih kecil” ketimbang gerakan sosial.¹⁰

⁹ Wayne Parsons. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

¹⁰ Ibid. Hlm. 19

Menurut Permenpan Nomor 4 Tahun 2007, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

1.2 Pengertian Publik

Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Publik Nomor 4 Tahun 2007, menjelaskan bahwa Publik adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

¹¹Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki.

Sedangkan menurut Oemi, pengertian publik mengacu pada sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama pula. Hal yang menonjol dalam publik adalah perhatian dan kepentingan, bukan kehidupan atau hubungan antar anggotanya.¹²

1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2007, Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan, melakukan kegiatan, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

¹¹ Inu Kencana Syafii (et al). 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

¹² [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16248/3/Chapter %20II. pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16248/3/Chapter%20II.pdf) diakses pada 10 September 2015 19.10 WIB

¹³Definisi kebijakan publik yang lain dikemukakan oleh Heidenheimer dimana Kebijakan Publik merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah.

¹⁴Selaras dengan Heidenheimer, Thomas Dye mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Kebijakan publik adalah salah satu poin penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan di berbagai sektor seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain.

Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

¹⁵Pendapat ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

¹³ Wayne Parsons, Op.Cit., Hlm 19

¹⁴ Ibid Hlm. 20

¹⁵ Inu Kencana Syafie, dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 104

RC. Chandler dan JC. Plano menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Berdasarkan pendapat keduanya, dapat diketahui bahwa tujuan diciptakannya kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik dengan instrumennya yakni sumberdaya yang ada.¹⁶

Salah satu faktor pendorong munculnya sebuah kebijakan publik yang lain yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang hendaknya dapat dipenuhi untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

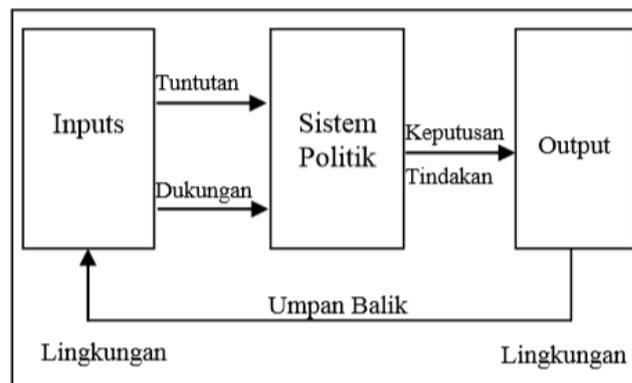
Untuk memecahkan berbagai masalah yang sangat beragam dengan faktor pemicu dan penyebab yang juga bermacam-macam, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat. Begitu pula agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah juga harus dapat menerapkan kebijakan-kebijakan dengan tepat. Untuk mendapatkan sebuah ketepatan antara kebijakan publik dengan permasalahan atau kebutuhan masyarakat, diperlukan pembuatan kebijakan publik yang seksama.

1.4 Proses Kebijakan Publik (Teori David Easton)

Menurut *David Easton*, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat didalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau

¹⁶ Ibid.

bersifat otoritatif diimplementasikan sebagaimana yang dikemukakan Varma, David Easton memandang sistem politik sebagai sebuah sistem yang memiliki unsur interaksi yang melibatkan masyarakat dan bersifat mengikat.¹⁷ Hal ini bisa dilihat dari gambar yang digagas oleh David Easton dibawah ini.



Gambar 1. 1 Model Proses Kebijakan Publik Menurut David Easton
(Sumber: Wikipedia dalam Magriasti (2011))

Gambar di atas menunjukkan sistem politik yang dimulai dari masukan (*input*) yang masuk sebagai *ingredients* yang merupakan sumber penting berjalannya sistem ini. *Input* ini dapat berupa tuntutan maupun dukungan yang nantinya akan masuk ke dalam sistem politik. Sistem politik di sini yaitu meliputi proses-proses *decision making* yang melibatkan aktor-aktor politik atau birokrat untuk kemudian menghasilkan keputusan atau tindakan terhadap tuntutan atau dukungan yang masuk ke dalam sistem tadi.

¹⁷ Lince Magriasti. 2011. *Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah.

Keputusan atau tindakan ini akan menjadi *output* yang berupa kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan publik. Setelah ada implementasi kebijakan maka akan ada umpan balik atau *feedback* baik yang berupa tuntutan maupun dukungan. Umpan balik inilah yang akan masuk kembali ke dalam sistem sebagai *input* begitu seterusnya.

1.5 Prinsip Penyusunan Kebijakan Publik

¹⁸Prinsip-prinsip penyusunan kebijakan publik terdiri dari:

a. Benar Dalam Proses

Penyusunan Kebijakan Publik prosesnya harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan pihak yang seharusnya terlibat.

b. Benar Secara Isi

Yaitu bahwa isi kebijakan: mengatur isu kebijakan yang harus diatur, langsung kepada masalah yang diatur, tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau setara, dan pasal-pasal nya sinkron.

c. Benar Secara Politik Etik

Yaitu mengakomodasi para pihak yang terkait secara langsung dengan kebijakan, menerapkan prinsip pokok *Good Governance*.

d. Benar Secara Hukum

Yaitu bahwa kebijakan ini benar-benar merupakan kaidah umum yang memberikan batas-batas aturan serta mencantumkan sanksi yang

¹⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah*.

tegas bagi pelanggaran atasnya, dan memberikan keadilan dan kesamaan di depan hukum bagi publik.

e. Benar Secara Manajemen

Isi dari kebijakan bersifat sistematis, dapat dilaksanakan meskipun pelaksanaannya bukan oleh pemerintah, namun pemerintah dapat mengendalikannya dengan efektif dan mempunyai manfaat dan dampak yang terukur.

f. Benar Secara Bahasa

Yaitu bahwa kebijakan publik di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

1.6 Bentuk Kebijakan Publik

Bentuk Kebijakan Publik adalah:

a. Peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal

Peraturan yang terkodifikasi terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksana lainnya.

b. Pernyataan Pejabat Publik di depan publik

Pernyataan pejabat publik dimaksud adalah pernyataan dari pejabat publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, ataupun

pernyataan-pertanyaan publik, termasuk di dalamnya pernyataan kepada media massa di depan publik.¹⁹

1.7 Stratifikasi Kebijakan Publik

a. Kebijakan di tingkat pusat

Yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional

b. Kebijakan di tingkat daerah

Yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah

1.8 Sifat Kebijakan Publik

Sifat kebijakan publik terdiri dari:

a. Kebijakan Publik Strategis

Berkaitan dengan penetapan politik dan strategi dasar negara yang menyentuh wewenang dan penyelenggaraan tugas lembaga pemerintah

b. Kebijakan Publik Manajemen

Berkaitan dengan pembentukan kebijakan pemerintah sebagai penjabaran terhadap politik dan strategi dasar pemerintahan

¹⁹ Ibid. Hlm 24.

c. Kebijakan Publik Teknis

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran-sasaran tertentu secara teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pada umumnya.²⁰

1.9 Tiga Pilar Dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Ada tiga pilar dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu:

a. *Model Of Reasoning*

Model of Reasoning adalah pembuatan keputusan rasional. Dalam model ini, keputusan-keputusan harus dibuat berdasarkan tahap-tahap yang telah ditentukan dengan benar, meliputi:

1. Identifikasi objektif
2. Identifikasi arah-arrah alternatif dari tindakan/aksi untuk pencapaian yang objektif
3. Memprediksi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif-alternatif
4. Mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif-alternatif
5. Memilih atau menyeleksi alternatif yang memaksimalkan pencapaian objektif

²⁰ Ibid. Hlm 24.

b. *Model Of Society*

Model ini menggarisbawahi bahwa proyek yang bersifat rasional kontemporer adalah pasar. *Society* atau masyarakat dipandang sebagai sebuah koleksi otonom, rasional pembuat keputusan yang tidak memiliki komunitas hidup. Mereka memaksimalkan *self-interest* melalui perhitungan rasional. Jadi, model pasar dan model pembuatan keputusan rasional memiliki keterkaitan.

c. *Model Of Policy Making*

Model ini adalah sebuah model produksi, dimana kebijakan dibuat secara adil sesuai dengan tahapan yang diminta, hampir semuanya berada di jalur sidang. Banyak ilmuwa politik mengatakan “mengumpulkan elemen-elemen” dari kebijakan. Sebuah isu “ditempatkan pada agenda” dan sebuah masalah harus ditandai. Hal ini berjalan melalui legislatif dan eksekutif sebagai cabang dari pemerintah, dimana solusi alternatif diajukan, dianalisa, dilegitimasi, diseleksi, dan ditandai kembali.²¹

1.10 Konsep Teoritik Kebijakan Publik yang Berpusat pada Negara

Konsep Teoritik Kebijakan Publik yang Berpusat pada Negara meliputi:

²¹ Deborah Stone. 2002. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (Revised Edition)*. New York: W.W. Norton & Company. (diterjemahkan)

a. Pendekatan Kepentingan Negara

Pendekatan ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara yang memiliki independensi untuk membela kepentingan negara.

b. Model Kelembagaan (Institusional)

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang memang dianggap memiliki tugas dan hak untuk itu, karena secara struktural pemerintah adalah pihak yang diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur negara.

c. Pendekatan Politik Birokratik

Pendekatan ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan lebih karena untuk membela kepentingan instansi pemerintahannya sendiri dalam kerangka bersaing dengan kepentingan instansi pemerintah lainnya.

d. Model Elit

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang mewakili kepentingan elit-elit pemegang kekuasaan negara. Dalam hal ini kebijakan publik dibuat secara *top-down* untuk mempertahankan *status quo*.

e. Model-model Aktor Rasional

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat negara dengan mempertimbangkan semua sumber daya,

informasi, dan alternatif demi tercapainya preferensi para pejabat itu sendiri

f. Model Rasional

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan *cost-benefit analysis* dari segi efisiensi keuangan.

g. Model Inkremental

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan praktis untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya dengan perubahan sedikit demi sedikit.

h. Model Pengamatan Terpadu

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan berupa penggabungan antara model rasional dengan model inkremental. ²²

1.11 Konsep Teoritik Kebijakan Publik yang Berpusat pada Masyarakat
Konsep Teoritik Kebijakan Publik yang Berpusat pada Masyarakat meliputi:

a. Pendekatan-pendekatan Analisis Kelas

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh para pejabat negara, tetapi secara substansial mewakili

²² Ulung Pribadi. 2013. *Diktat Formulasi Kebijakan Publik*.

kepentingan kelas dominan yang akan melanggengkan kekuasaannya di atas kelas subordinasi.

b. Model Proses

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah setelah menerima artikulasi dan agregasi kepentingan dari masyarakat.

c. Model Sistem

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah melalui tahap-tahap: *input* (berupa tuntutan dan dukungan), *throughput* (berupa pembuatan keputusan), dan *output* (berupa peraturan perundang-undangan).

d. Pendekatan-pendekatan Pluralis

Pendekatan ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah secara formal, tetapi secara substansial mewakili formasi konflik, tawar-menawar, dan koalisi di antara kelompok-kelompok sosial yang sangat beragam dalam masyarakat guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama dari para anggotanya.

e. Model Kelompok

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah secara formal, tetapi secara substansial oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Peran

pemerintah adalah mencari titik kompromi di antara kelompok-kelompok tersebut.

f. Model Pilihan Publik

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat dan pemerintahan.

g. Model Teori Permainan

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili kepentingan pihak-pihak yang berkonflik.

h. Model Perencanaan Strategis

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik secara formal dibuat oleh pemerintah, tetapi secara substansial mewakili organisasi-organisasi yang terutama secara ekonomi berkepentingan melangsungkan eksistensinya dalam rangka beradaptasi dengan perubahan lingkungan global.

i. Model Demokrasi

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik secara formal dibuat oleh pemerintah, tetapi secara substansial melibatkan anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat secara luas (partisipatif).

j. Model Pelayanan Publik

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial dilakukan oleh warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai perantara.²³

2. Teori *Agenda Setting*

2.1 Pengertian *Agenda Setting*

Menurut William Dunn, *Agenda Setting* adalah proses tempat dimana ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik, jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.²⁴

Namun, tidak semua isu nantinya dapat menjadi agenda publik. Maka dari itu, proses *Agenda Setting* ini menuntut kecermatan dan ketelitian *policy maker* untuk dapat menentukan isu publik mana yang telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas di dalam agenda publik. *Agenda Setting* adalah suatu proses menyusun agenda kebijakan pemerintah berdasarkan daftar isu-isu publik. Daftar isu-isu publik tersebut dibuat skala prioritas untuk kemudian dapat diketahui mana saja isu publik yang dapat menjadi masalah publik yang kemudian masuk dalam agenda kebijakan.

²³ Ibid Hlm. 29

²⁴ Ibid. Hlm. 105

2.2 Teori *Agenda Setting* John Kingdon

²⁵Menurut teori *Agenda Setting* John Kingdon, *Agenda Setting* adalah tahap pertama dalam proses kebijakan. Agenda kebijakan adalah daftar masalah atau isu-isu yang menjadi perhatian serius pejabat pemerintah, atau orang-orang yang membuat keputusan.

John Kingdon menjelaskan pendekatan baru dalam analisis pengambilan keputusan atau kebijakan publik, yang meliputi tiga aspek yang dikenal dengan *Three Stream Theory*, yaitu:

1. *Problem Stream*

Problem Stream adalah penjelasan terkait dengan “masalah”, yaitu hal-hal yang menjadi perhatian massa dan bisa mengubah atau mempengaruhi orang-orang. Masalah adalah peristiwa-peristiwa yang bisa dirasakan atau dipahami semua orang. Dalam *Problem Stream* terjadi pemetaan terhadap masalah-masalah yang ada baik yang dimulai dari skala kecil hingga yang sudah mencapai masa kritis.

2. *Policy Stream*

Policy Stream membahas tentang usulan kebijakan yang bermula dari adanya *single-issue* atau prakiraan yang luas oleh ahli kebijakan dari pihak-pihak yang mungkin akan kehilangan atau mendapatkan sesuatu dari undang-undang atau peraturan dan dari koalisi formal (atau informal) dari entitas terpisah yang berbagi kepentingan bersama.

²⁵ Paul J.Larkin Jr. 2012. *John Kingdon's "Three Streams" Theory and the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996*. *Journal of Law and Politics*. Volume 28: Page 25-26.

3. *Politics Stream*

Politics Stream dibentuk oleh perubahan administrasi atau partai mayoritas di DPR, pensiun atau kekalahan legislator kuat, pemilihan baru, karismatik pejabat, referendum publik, dan keinginan di antara pemilih.

2.3 *Metode Agenda Setting*

²⁶Untuk melakukan proses *Agenda Setting*, ada beberapa metode untuk mengidentifikasi masalah-masalah publik. Metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a. *Back of The Envelope Calculations*

Metode ini adalah metode perhitungan kasar. Metode ini mengidentifikasi publik dengan cara mencatat pada sepotong kertas yang ada dari setiap masalah yang ditemui dari koran, televisi, radio, dan lain-lain berdasarkan asumsi yang sederhana.

b. *Quick Decision Analysis*

Metode ini adalah metode untuk menganalisa keputusan yang mungkin menggunakan sebuah proses evaluasi formal, yang mengevaluasi alternatif-alternatif yang teridentifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

²⁶ Pribadi, Op.Cit, Hlm. 29

c. *Creation of Valid Operational Definition*

Metode ini mengidentifikasi masalah publik dengan melakukan serangkaian tes validasi untuk menentukan keberadaan dan kuantitas masalah publik tersebut.

d. *Political Analysis*

Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengenali masalah berdasarkan analisis politik yakni yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan masyarakat.

e. *The Issue Paper/First Cut Analysis*

Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengenali masalah dengan memperhatikan paper, jurnal ilmiah, diskusi, dan lain-lain.

2.4 Teknik Menyusun Prioritas Masalah Publik

²⁷Membuat prioritas masalah publik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Menyusun kuesioner masalah-masalah publik

Tabel 1.2 Tabel penilaian prioritas masalah publik

No	Masalah Publik	Argumentasi	Penilaian				
			1	2	3	4	5
1.							
2.							
3.							
4.							

(Sumber: *Diktat Kuliah Formulasi Kebijakan Publik, Ulung Pribadi*).

²⁷ Ibid. Hlm. 35

b. Menentukan populasi dan sampel *stakeholders*

Populasi dari masalah-masalah publik adalah *stakeholders* pemerintahan. Kemudian sampelnya diambil dari *stakeholders* secara proporsional untuk mewakili keseluruhan *stakeholders* tersebut. Masing-masing sampel tersebut akan diberi kuesioner masalah-masalah publik yang telah dipaparkan di atas.

c. Pengolahan data dan penyimpulan prioritas masalah

Penilaian :

- 1 = tidak penting
- 2 = kurang penting
- 3 = cukup penting
- 4 = penting
- 5 = sangat penting

Setelah tabel penilaian prioritas masalah publik diisi maka dapat diketahui permasalahan publik yang ada beserta dengan poin penilaiannya. Hasil tersebut kemudian diolah sehingga didapatkan kesimpulan permasalahan apa sajakah yang layak menjadi prioritas dalam agenda kebijakan.

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Kebijakan Publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan, melakukan kegiatan, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak dengan pertimbangan tentang

bagaimana, mengapa, dan apa akibat dari keputusan atau tindakan tersebut.

2. *Agenda Setting* adalah suatu proses menyusun agenda kebijakan pemerintah berdasarkan daftar isu-isu publik. Daftar isu-isu publik tersebut dibuat skala prioritas untuk kemudian dapat diketahui mana saja isu publik yang dapat menjadi masalah publik yang kemudian masuk dalam agenda kebijakan.
3. Program *One Village One Product* atau yang lebih dikenal dengan sebutan OVOP, adalah suatu program berbasis *Community Development* yang dimaksudkan untuk membantu pengembangan kemampuan masyarakat desa pada produk tertentu dan meningkatkan ekonomi pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat pada level *grassroot* serta untuk mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang ada di setiap daerah dan mendorong daerah-daerah untuk dapat memunculkan produk-produk andalannya.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Indikator *Agenda Setting* yang dianalisis adalah:

1. Metode *Agenda Setting*

Metode yang digunakan dalam proses *Agenda Setting* adalah *Quick Decision Analysis*.

2. Teknik Menyusun Prioritas Masalah Publik

3. Proses *Agenda Setting*

Proses *Agenda Setting* meliputi tiga aspek penting yang dikenal dengan *Three Stream Theory*, yang meliputi: *Problem Stream*, *Policy Stream*, dan *Politics Stream*.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Bodgan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Menurut Nasution, penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat digaris bawahi bahwa penelitian deksriptif kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dan berinteraksi untuk mendapatkan data langsung dari obyek-obyek penelitian dan menafsirkannya dengan data deskriptif.

²⁸ Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 3.

²⁹ S. Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. Hlm 5.

Penelitian mengenai *Agenda Setting* Program OVOP ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait dengan *Agenda Setting Program* OVOP di Kabupaten Bantul. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta langsung yang ada di lapangan yakni di institusi-institusi Pemerintahan Kabupaten Bantul dan kelompok masyarakat yang terlibat di dalam *Agenda Setting* OVOP, untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait *Agenda Setting* Program OVOP.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul tepatnya di BAPPEDA Kabupaten Bantul dan SKPD terkait untuk menghimpun data terkait dengan pemetaan masalah dan usulan kebijakan OVOP Kabupaten Bantul. Selanjutnya adalah DPRD Kabupaten Bantul untuk mengumpulkan data-data dan informasi mengenai proses politik perumusan OVOP dan legalisasi dokumen OVOP. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dari UKM sasaran OVOP untuk mencari data terkait dengan *Policy Stream*.

3. Unit Analisis

Menurut Hamidi, menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar

peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.³⁰

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

a. Unit Analisis Kelompok

Unit Analisis kelompok dalam penelitian ini adalah kelompok-kelompok OVOP. Kelompok yang diteliti adalah kelompok OVOP Tamanmojo dan kelompok OVOP Madu Bambu yang masuk di dalam program OVOP Kabupaten Bantul.

b. Unit Analisis Organisasi

Unit analisis organisasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul. Unit observasinya yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bantul, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, serta SKPD yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Bantul yang terkait dengan program OVOP.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan subjek darimana data diperoleh. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer dari instansi di Kabupaten Bantul, DPRD Bantul, dan kelompok OVOP Bantul yakni hasil wawancara dengan narasumber berupa metode *Agenda Setting* yang digunakan yakni *Quick Decision*

³⁰ Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press. Hlm. 75.

Analysis, teknik yang digunakan dalam membuat prioritas masalah publik, dan proses *Agenda Setting* yang meliputi *Problem Stream*, *Policy Stream*, dan *Politics Stream*. Jenis data sekunder berupa artikel, tabel-tabel data kemiskinan, data desa tertinggal, draft kebijakan OVOP dan lain-lain.

b. Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat yang berupa hasil penelitian yang ditunjukkan dalam penjelasan di dalam pembahasan. Selain itu terdapat gambar terkait dengan proses di dalam sistem politik, dan tabel-tabel data kemiskinan, data desa tertinggal, dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang

akan datang, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.³¹

Peneliti melakukan metode wawancara terstruktur kepada narasumber yaitu menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang diajukan secara spesifik yang ingin digali dari narasumber. Narasumber –narasumber yang diwawancarai adalah Drs. Fauzan Mu'ariffin selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA Bantul; Widodo, Amd selaku Ketua Komisi B DPRD Bantul; Muji Rahayu, SH., M.Hum selaku Kepala Subbag Program Disperindagkop Bantul; Hj. Jazimah sebagai tokoh penggerak Kelompok OVOP Tamanmojo dan Parjo sebagai tokoh penggerak Kelompok OVOP Madu Bambu.

2. Observasi

Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk

³¹ Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 186

mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.³²

Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan di lapangan dengan turun langsung ke kelompok OVOP Karang mojo dan kelompok OVOP Madu Bambu sebagai bagian dari kelompok OVOP Kabupaten Bantul.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto bahwa dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.³³ Peneliti melakukan teknik pengumpulan data ini dengan menghimpun data baik dari dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi serta obyek lain yang terkait dengan program OVOP dan proses *Agenda Setting*. Teknik dokumen diperlukan diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dokumen yang dihimpun antara lain data-data kemiskinan, data desa tertinggal, profil institusi yang dijadikan tempat wawancara, *draft* kebijakan OVOP, dan lain-lain.

³² M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 82.

³³ Suharsimi Arikunto. 2006. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 158.

5. Teknik Analisa Data

Proses analisa data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, meginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Dalam penelitian ini, proses atau tahapan dalam mengolah data adalah sebagai berikut :

1. Pengelompokan data

Dimana pengelompokan data ini dilakukan untuk menentukan data-data yang penting yang terkait dengan tema/topik dari proposal penelitian ini yakni *Agenda Setting Program One Village One Product (OVOP) Kabupaten Bantul*.

2. Reduksi data

Peneliti melakukan pemilihan data yang masih diperlukan ataupun data yang sudah tidak diperlukan.

3. Interpretasi

Peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang sudah dipilih untuk dijadikan bahan dalam pembuatan proposal ini.

4. Uji Keabsahan Data Dengan Triangulasi

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Menurut Moloeng (2004) triangulasi adalah teknik menguji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

5. Kesimpulan

Selanjutnya, peneliti menentukan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di dalam proposal penelitian.

6. Publikasi/display berupa tulisan

Setelah memperoleh kesimpulan, peneliti akan melakukan publikasi atau display terhadap hasil dari penelitian ini dalam bentuk jurnal *online*.